

JUKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PILKADA 2024 TERBIT

Jumlah TPS Diproyeksikan Berkurang Signifikan

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya mulai tancap gas untuk menyiapkan tahapan Pilkada 2024. Salah satunya pembentukan badan adhoc seiring petunjuk teknis (juknis) yang sudah diterbitkan oleh KPU RI. Di samping itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga diproyeksikan akan berkurang signifikan jika dibanding Pemilu 2024 kemarin.

Komisisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, menjelaskan berkurangnya jumlah TPS pada Pilkada 2024 nanti seiring penyesuaian aturan. "Kalau dalam Pileg maupun Pilpres kemarin kan batasan pemilih di tiap TPS ialah 300 pemilih. Tetapi untuk Pilkada dalam undang-undangnya disebutkan jika jumlah pemilih di tiap TPS minimal 500 pemilih dan maksimal 800 pemilih," jelasnya, Kamis (18/4).

Pada Pileg dan Pilpres kemarin, total ada 1.928 TPS dan 14 TPS khusus di Kota Yogya. Sedangkan pada Pilkada 2017 lalu, total TPS di Kota Yogya hanya 794 TPS. Diprediksi jumlah TPS pada Pilkada Kota Yogya 2024 juga tidak akan lebih dari 1.000 TPS. Dengan adanya pengurangan jumlah TPS, maka

badan adhoc terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) otomatis juga akan berkurang. Hanya, kepastian jumlah TPS akan ditentukan setelah pemutakhiran data pemilih.

Erizal menambahkan, sesuai tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 akan dimulai pada 31 Mei dan berakhir paling lambat 23 September 2024. Dari proses itu bisa diprediksi kebutuhan TPS untuk mengakomodir pemilih. "Akan lebih simpel sehingga tidak membutuhkan TPS yang gemuk. Surat suaranya juga hanya satu dan pemilihnya pun hanya penduduk Kota Yogya, sehingga tidak perlu lagi ada TPS khusus. Semuanya ialah TPS reguler," imbuhnya.

Terkait pembentukan badan ad-

hoc, pihaknya tengah melakukan persiapan. Juknis menyangkut hal tersebut juga sudah diterimanya kemarin malam dan langsung dilakukan kajian. Jadwal pembentukan badan adhoc pun sudah bisa dilakukan sejak 17 April 2024 lalu dan paling lambat 5 November 2024. Badan adhoc yang akan dibentuk lebih dulu ialah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan KPPS akan dibentuk paling akhir setelah ada kepastian jumlah TPS.

Sesuai dalam juknis pembentukan badan adhoc, PPK dan PPS bisa dibentuk dengan rekrutmen baru atau evaluasi anggota sebelumnya. Erizal mengaku, pihaknya lebih condong untuk melakukan rekrutmen terbuka dibanding evaluasi karena prosesnya lebih transparan. "Tetapi ini masih kami kaji bersama unsur komisisioner lainnya," tandasnya.

Di samping itu, bagi tokoh yang hendak berlaga melalui jalur perseorangan ditimbau segera melakukan persiapan. Pasalnya dibutuhkan 27.340 pemilih sebagai

syarat dukungan untuk mengajukan pencalonan. Pemenuhan dukungan bakal calon dari jalur perseorangan dimulai 5 Mei 2024. Sedangkan pendaftaran pasangan calon baik yang diusung oleh partai politik maupun jalur perseorangan dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

Oleh karena itu penggalangan dukungan jalur perseorangan harus mulai dilakukan, mengingat banyaknya dukungan yang dibutuhkan. Apalagi sepanjang pilkada di Kota Yogya belum pernah ada sejarah pasangan calon yang maju dari jalur tersebut.

Sementara itu Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Sri Surani, Jumat (19/4) mengatakan, rencananya pada 23 April mendarat pengumuman dan sosialisasi pendaftaran badan adhoc Pilkada 2024 akan dimulai. Petugas badan adhoc yang bekerja pada Pemilu 2024 juga memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri. Pembentukan badan adhoc, untuk seluruh Indonesia secara nasional sama, sesuai dengan ketentuan yang ada. (Dhi/Ria)-f

Halal Bihalal IKWI Yogya dengan Kiprah Positif



KR-Juvinarto
Hj Sri Surya Widati menyampaikan tali asih pada Warakawuri yang diserahkan Drs H Hudono SH.

YOGYA (KR) - Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Yogyakarta menjadi wadah sosial kemasyarakatan bagi anggota keluarga wartawan. Dengan berbagai kegiatan dan kiprah positif yang bermanfaat, mengakrabkan, serta merekatkan persaudaraan antar keluarga wartawan Yogya.

"Setelah sebulan berpuasa, badan menjadi lebih sehat dan kita berkumpul berkegiatan bersama sekali lagi halal bihalal (Syawalan)," ungkap Ketua IKWI Yogyakarta Hj Sri Surya Widati kepada KR di sela pertemuan rutin dan Halal Bihalal IKWI Yogyakarta, Jumat (19/4) di Aula PWI DIY.

Acara semarak dengan penampilan kulintang dari ibu-ibu istri wartawan DIY yang rutin latihan setiap hari Jumat dan terus didorong Bu Idham sapaan akrab Sri Surya Widati untuk bisa diikuti semua anggota IKWI. "Juga disampaikan tali asih pada 22 Warakawuri, yaitu ibu-ibu yang suaminya (wartawan) telah meninggal. Sebagai wujud perhatian, persaudaraan yang kuat," ungkap Bu Idham.

Acara juga dihadiri Ketua PWI DIY Drs H Hudono SH, Ketua SIWO PWI DIY Drs Widyo Suprayogi juga beberapa wartawan senior, pengurus PWI DIY. "IKWI Yogyakarta banyak membantu PWI DIY dalam berbagai kegiatan. IKWI Yogya juga memberikan manfaat bagi keluarga wartawan," ucap Hudono.

Hudono menyebutkan dalam waktu dekat, kantor PWI DIY akan pindah sementara karena Gedung PWI DIY akan dibangun menjadi Grha Pers, gedung Lt 4. "Kita belum menentukan kantor baru, sementara ada gambaran di TK Bumi Warta, yang juga dikelola IKWI Yogya," jelasnya. (Vin)-f

EVALUASI WISATAWAN LIBUR LEBARAN 2024

Masa Tinggal Lebih Singkat, Belanja Meningkatkan

YOGYA (KR) - Selama libur Lebaran tahun ini masa tinggal wisatawan di Kota Yogya justru tercatat lebih singkat dibanding momentum yang sama pada tahun lalu. Akan tetapi sebaliknya, tingkat belanja wisatawan cenderung mengalami peningkatan meski tidak terlalu drastis.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menilai perbandingan leight of stay (masa tinggal) dan spending money (tingkat belanja) wisatawan menjadi tolak ukur yang lebih proporsional dalam mengukur dampak ekonomi dibanding hanya mempertimbangkan

volume atau jumlah wisatawan yang berkunjung. "Ini wujud tahapan quality tourism sehingga jumlah kunjungan bukan lagi satu-satunya (tolak ukur) melainkan spending money dan leight of stay nya. Jadi bagaimana wisatawan yang datang itu merasa aman, nyaman dan berkesan," ungkapnya, Jumat (19/4).

Dari aspek masa tinggal wisatawan selama libur Lebaran tahun ini, tercatat 1,8 hari. Lebih singkat dibanding periode yang sama pada tahun 2023 lalu yang mencapai 2,1 hari. Masa tinggal yang lebih singkat tersebut diprediksi dampak

dari kemudahan akses bagi wisatawan dalam melakukan pergerakan. Terutama dalam menjangkau daerah satu ke daerah lain. Sehingga wisatawan yang singgah ke Kota Yogya dapat dengan mudah berpindah ke daerah lain guna menikmati destinasi lain.

Sedangkan aspek belanja wisatawan, pada Lebaran tahun ini terbentuknya sebanyak Rp 2,18 juta per orang per hari. Meningkatkan sedikit dari periode yang sama pada tahun lalu yakni Rp 2,09 juta per orang per hari. "Itu hitungannya per hari. Jika wisatawan berada di sini dua hari maka

dikalikan dua. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat ada peningkatan," imbuh Singgih.

Singgih menjelaskan, perbandingan tersebut dihitung selama sepuluh hari libur Lebaran. Secara umum, evaluasi libur Lebaran tahun ini juga relatif lebih bagus. Dari sisi kedatangan arus lalu lintas cenderung lebih lancar dari tahun sebelumnya. Okupansi tertinggi terjadi

pada Idul Fitri hingga tiga hari, kemudian selebihnya berangsur menurun.

Di samping itu, komplain dari wisatawan baik yang disampaikan melalui media sosial maupun hotline Pemkot juga jauh berkurang. Baik mengenai persoalan parkir maupun tarif yang nuthuk. "Semoga ini berkat kesiapan yang cukup matang dalam menyambut wisatawan serta para pelaku maupun wisatawan juga mampu mengikuti ritme yang sudah kami siapkan," urainya. (Dhi)-f

Meningkat, Kepatuhan Perusahaan Bayar THR

YOGYA (KR) - Kepatuhan perusahaan dalam membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun 2024 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari jumlah perusahaan yang telat atau mengangsur pembayaran THR Lebaran tidak sebanyak tahun sebelumnya. Bahkan secara umum perusahaan sudah mematuhi aturan terkait dengan penyaluran THR lebaran. Kepatuhan perusahaan yang telah mengikuti ketentuan penyaluran THR tersebut patut diapresiasi.

"Kalau dilihat dari data yang ada, persentase pembayaran THR pada Lebaran meningkat hampir 75 persen dibandingkan tahun sebelum. Hal itu dikarenakan perusahaan telah mematuhi surat edaran soal THR Lebaran. Memang pada H-7 Lebaran lalu ada belasan perusahaan yang diadukan pekerjaannya lantaran belum membayarkan THR. Hanya saja sebagian besar sudah memenuhi kewajibannya dan tinggal beberapa perusahaan saja yang belum," kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus di Yogyakarta, Kamis (18/4).

Dikatakan, perusahaan yang telat membayar THR, saat ini tengah melaksanakan langkah bipartit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila dialog itu tidak mencapai kesepakatan dan surat peringatan kedua tidak diindahkan maka tindakan represif bisa dilakukan oleh Disnakertrans DIY. Adapun bentuknya beragam bisa berupa pembatasan produksi barang dan jasa atau bahkan menghentikan aktivitas perusahaan itu. Kendati demikian pihaknya berharap tidak ada perusahaan yang diberikan sanksi administrasi. Kalaupun ada nanti yang memberi sanksi adalah instansi di mana wilayah perusahaan itu berada.

"Saat ini kami sedang melaksanakan penegakan norma kepatuhan dengan memberikan surat peringatan berupa nota pemeriksaan. Itupun hanya tinggal beberapa perusahaan saja, mudah-mudahan bisa segera dibayarkan," ungkap Amin.

Lebih lanjut Amin menambahkan, bagi perusahaan yang telat membayar THR Lebaran kepada pekerjaannya, ada tahapan penindakan yang dilakukan oleh Disnakertrans DIY. Penindakan pertama berupa pemberian surat peringatan dan ditunggu selama tujuh hari. (Ria)-f

Partai Golkar Kota Yogya Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

YOGYA (KR) - DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta membuka pendaftaran Calon Kepala Daerah (Walikota Yogyakarta). Pendaftaran dibuka 22-24 April 2024 di Kantor DPD Partai Golkar Kota Yogya, Jalan Kumpul Bambang Suprpto No 1 Yogyakarta.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, Dr Agus Mulyono menuturkan, pendaftaran gratis, namun untuk biaya survei ditanggung oleh para pendaftar secara patungan. "Semoga kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh masyarakat," kata Agus kepada KR, Jumat (19/4).

Menurut Agus, saat ini yang sudah terjaring sebagai Calon Kepala Daerah di Partai Golkar Kota Yogya adalah M Afnan Hadikusumo dan Dr Agus Mulyono. Keduanya telah diundang

oleh DPP Golkar untuk mendapat pembekalan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartato, pada 6 April 2024 lalu.

Lebih lanjut dikatakan Agus, mengingatkan Partai Golkar untuk mengusung calon kepala daerah perlu koalisi, maka dibuka pendaftaran calon kepala daerah lewat Partai Golkar. Adapun pada Pemilu 2024 kemarin, Par-

tai Golkar Kota Yogya memperoleh 5 kursi, sehingga tinggal kurang 4 kursi untuk mengusung calon kepala daerah.

"Kami (Golkar Kota Yogya) membuka kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk bisa bergabung dengan Partai Golkar menyemarakkan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024," pungkasnya. (Dev)-f

Bersiap Hadapi La Nina Tingkatkan Literasi Iklim Pada Petani

KETAHANAN pangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya potensi alam dan sumberdaya yang begitu besar tidak seharusnya disia-siakan, hingga berujung pada impor pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017, produksi padi meningkat dari 69 juta ton ke 81 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Namun sejak 2018, produksi padi menurun drastis, yakni hanya 56,54 juta ton di tahun itu. Kemudian titik terendah di 2023 sebesar 53,63 juta ton.

Selain karena ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani padi, faktor penyebab lainnya tidak pernah jauh dari soal perubahan iklim ekstrem dan pengurangan luasan lahan akibat alih lahan.

Terkait cuaca, Pemerintah diminta mewaspadai La Nina pada semester kedua 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa El Nino diperkirakan akan segera menuju netral pada periode Mei-Juni-Juli 2024. Selanjutnya terdapat indikasi bahwa Indonesia akan menghadapi La Nina pada semester kedua 2024.

Berbeda dengan El Nino yang menyebabkan kekeringan ekstrem dan melemahnya produksi padi, La Nina diperkirakan membawa curah hujan yang berlebihan. Hal ini sebenarnya menguntungkan pertanian padi, namun sayangnya akan berdampak buruk pada pertanian sayur dan cabai karena air yang berlebihan.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Setia Budi Wibowo menegaskan pentingnya peran Pemerintah dalam memberikan literasi iklim. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mampu bersiap dan mengurangi resiko hingga dampaknya dalam pertanian.

"Kami menilai pentingnya peran pemerintah dalam



Setia Budi Wibowo.

KR-Budiono

memberikan literasi iklim kepada masyarakat. Lebih baik lagi jika disertai pendampingan terkait strategi praktisnya, sehingga tercapai ketangguhan petani terhadap perubahan iklim. Apalagi sebagian besar petani Indonesia termasuk dalam kategori petani gurem (kecil) yang rentan terdampak oleh suatu perubahan," tutur Wibowo.

Dengan kondisi tersebut, menurut Setia Budi Wibowo, Pemerintah perlu hadir, selain dengan memberikan pendampingan berupa literasi dan strategi adaptasi, juga masyarakat perlu mendapatkan kemudahan akses terhadap sumber daya pertanian seperti air, pupuk, lahan, hingga sarana produksi.

Jumlah petani juga menjadi persoalan tersendiri bagi Jawa Tengah. Petani di Jawa Tengah masih didominasi oleh generasi X, yaitu petani yang lahir tahun 1965-1980 dengan perkiraan usia antara 43-58 tahun (42,81 persen). Kemudian diikuti oleh generasi Baby Boomers yang lahir 1946-1964 perkiraan usia 59-77 tahun (35,37 persen). Untuk petani dari generasi Milenial (usia 27-42 tahun) tercatat masih berkisar 18,78

persen. Sedangkan untuk petani generasi Z yang lahir 1997-2012 (usia 11-26 tahun) sebanyak 0,96 persen.

Anggota Komisi DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie mengatakan, pemerintah daerah termasuk kabupaten/kota perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) profesional di bidang pertanian. Hal itu penting mengingat pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Jawa Tengah. Tujuan lain adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya serius dalam pengembangan SDM yang mumpuni di sektor pertanian.

Ia menyoroti perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi petani serta para profesional yang terlibat dalam rantai pasok pertanian. Perkembangan teknologi dalam pertanian berbasis digital dan pertanian berkelanjutan, menuntut adanya pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. "Kita perlu memastikan bahwa petani kita memiliki akses ke pengetahuan terbaru, teknologi modern, dan praktik terbaik dalam bertani," tutur Ferry Wawan Cahyono. (Bdi-Anf) adv.

RALAT IKLAN

Sehubungan dengan penayangan iklan Rubrik UTDI yang terbit di SKH Kedaulatan Rakyat edisi Jumat 19 April 2024 halaman 8, dibawah photo Rahmad Ramdhani, S.Kom. tertulis "Alumni Prodi Informatika UTDI" seharusnya yang betul adalah "Alumni Prodi Informatika UTDI". Demikian ralat iklan ini kami sampaikan dan kami mohon maaf atas kesalahan ini serta harap maklum.

Yogyakarta, 20 April 2024
Iklan Kedaulatan Rakyat